



BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 45 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, Pemerintah Daerah menyusun perencanaan pembangunan tahunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 10 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.

Pasal 2

Tujuan penyusunan RKPD tahun 2025 adalah:

- a. sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja Perangkat Daerah tahun 2025; dan
- b. sebagai pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS serta rancangan APBD tahun anggaran 2025.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2025 merupakan penjabaran program RPJMD Tahun 2021-2026 yang memuat evaluasi kinerja pembangunan Daerah, rancangan kerangka ekonomi Daerah dan prioritas pembangunan Daerah Tahun 2025.

- (2) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan sistematika penjabaran RKPD.
- (3) Sistematika penjabaran RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Perubahan RKPD tahun 2025 dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan keadaan, meliputi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah, dan keuangan Daerah, rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan; dan
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya, harus digunakan untuk tahun berjalan;yang menimbulkan penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru dalam perubahan RKPD tahun 2025.
- (2) Perumusan perubahan RKPD tahun 2025 perlu memperhatikan hasil kesepakatan bersama antara kepala daerah dengan ketua DPRD tentang penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru pada KUA dan PPAS.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 4 Juli 2024

BUPATI TRENGGALEK,
TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 4 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
TTD

EDY SOEPRİYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2024 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI

NIP. 19671223199203 2 004

**LAMPIRAN ...
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 45 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025**

RENJA INSPEKTORAT TAHUN 2025

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses berkelanjutan dalam penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dalam upaya pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada guna meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Dalam rangka mewujudkan sinergitas dan akselerasi pencapaian tujuan dan pembangunan yang telah dirumuskan bersama dan menjadi komitmen semua pihak maka setiap SKPD harus Menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (renja SKPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang sah dan harus dilaksanakan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah memiliki ruang lingkup yang terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPM), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD)

dengan prinsip memperhatikan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah yang tetap mengacu pada rencana tata ruang dan dilaksanakan secara bersama oleh semua pemangku kepentingan.

Dalam konteks manajemen pemerintahan, terdapat empat pilar komponen yang saling terkait dan saling mendukung, yaitu perencanaan (*Planning*), pengorganisasian (*Organizing*), pelaksanaan (*Actuating*), dan pengawasan (*Controlling*) penyelenggaraan pemerintah. Inspektorat Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu komponen dalam pelaksanaan pemerintahan yang memiliki peran penting sebagaimana kedudukannya yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan Daerah sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Inspektorat.

Peningkatan kualitas pengawasan pemerintah daerah sebagaimana tugas dan tanggung jawab Inspektorat Kabupaten Trenggalek dapat dilaksanakan dengan cara, diantaranya adalah: penyempurnaan perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan serta pendampingan dan asistensi, meningkatkan kualitas pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan pemerintah daerah melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya, meningkatkan kualitas pengawasan dengan tujuan tertentu dengan meningkatkan koordinasi antar aparat penegak hukum. Uraian tersebut merupakan salah satu pelaksanaan fungsi manajemen dalam pengawasan yang bersifat profesional dan obyektif sehingga dapat menjamin terlaksananya perencanaan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan guna mewujudkan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam upaya melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Inspektorat Kabupaten Trenggalek perlu menyusun Perubahan Rencana Kerja Tahunan (P-Renja) Inspektorat Tahun 2024. Perubahan Renja Inspektorat Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan pada tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Renstra. Perubahan Renja memuat program, kegiatan, sub kegiatan yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi

Inspektorat Kabupaten Trenggalek yang berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2024. Penyusunan Perubahan Renja Tahun 2024 juga menyelaraskan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana kerja Perangkat Daerah.

Untuk itu dalam melaksanakan tugas-tugas lebih lanjut, Inspektorat Kabupaten Trenggalek perlu menyusun Rencana Kerja Tahunan sebagai implemementasi dari Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Rensta) Inspektorat.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011—2031;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2026;
25. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 19 Seri E) Tanggal 28 Juni 2024;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012-2032;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Tahun 2021-2026;
31. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 tanggal 16 Desember 2021, Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 86; dan
32. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 45 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 45) tanggal 4 Juli 2024.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renja Inspektorat kabupaten Trenggalek tahun 2025 dimaksudkan untuk :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Inspektorat Kabupaten Trenggalek dalam melaksanakan tugasnya, menentukan prioritas sasaran dan target capaian kinerja yang dilaksanakan di dalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun 2025 dapat berjalan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan dalam pelaksanaan APBD tahun 2025;
2. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam tahun 2025; dan
3. Memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Trenggalek tahun 2025 adalah untuk :

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi Inspektorat dalam pengawasan di tingkat daerah;
2. Meningkatkan efektifitas dan kualitas pengawasan/pembinaan yang bersifat reguler, khusus dan pemeriksaan kasus;
3. Meningkatkan kompetensi dan kapabilitas SDM pengawasan/pembinaan; dan
4. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam pengawasan/pembinaan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Tahun 2025 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.
- 3.3. Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PD

Capaian kinerja Inspektorat hasil pelaksanaan Rencana Kerja merupakan hasil capaian pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian target RPJMD Kabupaten Trenggalek 2021-2026 dimana realisasi capaian kinerja Inspektorat Tahun 2023 dapat dilihat pada Table 2.1 dibawah ini.

**Tabel 2.1
Capaian Kinerja Tahun 2023**

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori) Nilai SAKIP	90,38 (AA)	90,58 (AA)	100,22
		Indeks Kepuasan Masyarakat	95	98,38	100,56
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Level Kapabilitas APIP	level 3 (3.00)	level 2 (2.62)	87,33
		Persentase rekomendasi pengawasan ekstrenal yang ditindak lanjuti	92%	92,01%	100,01
		Persentase rekomendasi pengawasan internal yang ditindak lanjuti	98%	98,35%	100,36
		Persentase Perangkat Daerah dalam menerapkan SPIP	67%	67,50%	100,75
		Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh hasil evaluasi SAKIP minimal kategori A/AA	100%	100%	100%
3	Meningkatnya upaya pencegahan Korupsi Instansi Pemerintah	Persentase capaian delapan area perubahan yang tuntas melaksanakan rencana aksi pencegahan korupsi	100%	100%	100
		Persentase Perangkat Daerah yang diusulkan menuju WBK/WBBM	12,50%	12,50%	100

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Inspektorat Kabupaten Trenggalek tahun 2023 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Renja Tahun bersangkutan dan APBD Kabupaten Trenggalek. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sampai dengan 31 Desember 2023 sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2
Realisasi Anggaran Program Dan Kegiatan Tahun 2023**

No	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		9.286.955.853	8.793.601.630	94,69
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	119.000.000	108.225.006	90,95
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.286.815.135	5.879.942.343	93,54
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	750.000	720.000	96,00
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	536.400.000	523.607.750	97,62
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	503.426.866	500.418.082	99,40
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.163.517.885	1.152.697.040	98,98
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	137.507.800	111.620.218	81,17%
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	539.538.167	517.371.191	95,89
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan		830.453.921	715.955.421	86,21
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	697.453.921	643.058.750	92,20
		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	136.000.000	72.896.671	53,60
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi		579.159.238	514.534.650	88,84
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	31.304.451	9.294.200	29,69
		Pendampingan dan Asistensi	547.854.787	505.240.450	92,22

No	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
Jumlah			10.699.569.012	10.024.091.701	93,69

Inspektorat Kabupaten Trenggalek menyadari bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilakukan, guna mengetahui penyebab kekurangan/kegagalan tersebut sebagai umpan balik/*feed back* dari yang telah dan akan dilaksanakan untuk itu dilakukan evaluasi terhadap realisasi kegiatan yang dikategorikan sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program kegiatan;
3. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
4. Kebijakan/tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun hasil evaluasi renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah dapat disajikan dalam Tabel 2.2 (T-C.29) sebagai berikut :

**Renja Inspektorat
Kabupaten Trenggalek Tahun 2025**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6.01	Bidang Inspektorat									
6.01.01	INSPEKTORAT									
6.01.01.01	INSPEKTORAT									
6.01.01.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100.00	142.51	100.00	100.67	100.67	100	343.18	3.4318
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100.00	86.77	100.00	90.80	90.80	100	277.57	2.7757
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.00	119.23	100.00	100.00	100.00	100	319.23	3.1923
6.01.01.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	26	31	65.00	65.00	100.00	65	161.00	6.192307692
6.01.01.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	10	11	0.00	0.00	0.00		11.00	1.1
		Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			22.00	22.00	100.00	17	39.00	0
6.01.01.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	9	9	0.00	0.00	0.00		9.00	1
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			43.00	43.00	100.00	48	91.00	0

**Renja Inspektorat
Kabupaten Trenggalek Tahun 2025**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	9	10	0.00	0.00	0.00		10.00	1.111111111
6.01.01.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100	89.89	100.00	100.90	100.90	100	290.79	2.9079
6.01.01.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		0	54.00	47.00	87.04	54	101.00	0
		Persentase Gaji Dan Tunjangan ASN Yang Disalurkan/ Dibayarkan	100	12	0.00	0.00	0.00		12.00	0.12
6.01.01.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			12.00	12.00	100.00	32	44.00	0
		Jumlah administrasi pelaksanaan tugas ASN yang disusun (buah/ dokumen)	12	5	0.00	0.00	0.00		5.00	0.416666667
		Jumlah dokumen angka kredit auditor yang dinilai	30	30	0.00	0.00	0.00		30.00	1
6.01.01.01.01.2.02.03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0	350.00	408.00	116.57	371	779.00	0
6.01.01.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0	35.00	35.00	100.00	38	73.00	0
6.01.01.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Barang Milik Daerah yang Diselesaikan		0	90.00	100.00	111.11	90	190.00	0
6.01.01.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik		0	12.00	12.00	100.00	27	39.00	0
6.01.01.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diselesaikan	100	95	100.00	104.55	104.55	100	299.55	2.9955

**Renja Inspektorat
Kabupaten Trenggalek Tahun 2025**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan (stel)			0.00	0.00	0.00	1	1.00	0
6.01.01.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan AdministrasiKpegawaian (penjagaan KP,Pensiun, KGB, Bezeting,Pengelolaan dokumen kepegawain dll)	Jumlah Dokumen Pendataan dan PengolahanAdministrasi Kepegawaian		0	11.00	12.00	109.09	50	62.00	0
6.01.01.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			54.00	50.00	92.59	54	104.00	0
		Jumlah APIP yang dikirim mengikuti pendidikan dan pelatihan (Orang)	53	53	0.00	0.00	0.00		53.00	1
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan yang dilaksanakan (kali)	20	9	0.00	0.00	0.00		9.00	0.45
6.01.01.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100	247.41	100.00	111.07	111.07	100	458.48	4.5848
6.01.01.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	0		2.00	2.00	100.00	2	4.00	0
		Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang diadakan (Buah)	60	20	0.00	0.00	0.00		20.00	0.333333333
6.01.01.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	0		8.00	8.00	100.00	8	16.00	0
		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan (Buah)	21	25	0.00	0.00	0.00		25.00	1.19047619
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang terlayani	0		0.00	0.00	0.00		0.00	0

**Renja Inspektorat
Kabupaten Trenggalek Tahun 2025**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6.01.01.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan			4.00	6.00	150.00	4	10.00	0
		Jumlah bahan logistik kantor yang diadakan (Unit)tt	14	15	0.00	0.00	0.00		15.00	1.071428571
6.01.01.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan			8.00	9.00	112.50	8	17.00	0
		Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan (Unit)	9	23	0.00	0.00	0.00		23.00	2.555555556
6.01.01.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/ Material yang disediakan			10.00	9.00	90.00	10	19.00	0
		Jumlah Material yang dipenyediaan (unit) ATK, Materai, dll	228	73	0.00	0.00	0.00		73.00	0.320175439
6.01.01.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu		0	6.00	6.00	100.00	6	12.00	0
		Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi (Kali)	4	5	0.00	0.00	0.00		5.00	1.25
6.01.01.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD			8.00	10.00	125.00	8	18.00	0
		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan dalam daerah	186	88	0.00	0.00	0.00		88.00	0.47311828
6.01.01.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD		0	12.00	9.00	75.00	12	21.00	0
		Jumlah Arsip Dinamis yang dikelola (buah)			0.00	0.00	0.00			0
6.01.01.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan	100	116.67	100.00	94.15	94.15	100	310.82	3.1082
6.01.01.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan		0	3.00	3.00	100.00	1	4.00	0
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan			0.00	0.00	0.00			0

**Renja Inspektorat
Kabupaten Trenggalek Tahun 2025**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan (unit)			0.00	0.00	0.00			0
		Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan			0.00	0.00	0.00	0		0
6.01.01.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan			28.00	9.00	32.14	7	16.00	0
		Jumlah mebel yang diadakan	12	21	0.00	0.00	0.00	0	21.00	1.75
6.01.01.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan			54.00	24.00	44.44	7	31.00	0
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan (unit)	13	87	0.00	0.00	0.00	0	87.00	6.692307692
6.01.01.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	4	3	0.00	0.00	0.00	0	3.00	0.75
		Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan			1.00	2.00	200.00	1	3.00	0
6.01.01.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan	100	90.23	100.00	91.33	91.33	100	281.56	2.8156
6.01.01.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat			4.00	4.00	100.00	4	8.00	0
		Jumlah surat dinas yang difasilitasi (Buah)	325	300	0.00	0.00	0.00	0	300.00	0.923076923
6.01.01.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			60.00	60.00	100.00	60	120.00	0
		Jumlah daya listrik kantor yang dicukupi (kwh)	25,527	24505	0.00	0	0.00	0	24505.00	0.95996396
		Jumlah jasa / bandwidth internet kantor yang dicukupi (Mbps)	4,800,000	100	0.00	0.00	0.00	0	100.00	2.08333E-05

**Renja Inspektorat
Kabupaten Trenggalek Tahun 2025**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah jasa telepon kantor yang dicukupi (Rupiah)	2,400,000	856478	0.00	0.00	0.00	0	856478.00	0.356865833
		Jumlah sumber daya air kantor yang dicukupi (meter kubik)	36	12	0.00	0.00	0.00	0	12.00	0.333333333
		Jumlah surat kabar yang dicukupi	365	257	0.00	0.00	0.00	0	257.00	0.704109589
6.01.01.01.01.2.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan			6.00	6.00	100.00	6	12.00	0
6.01.01.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (dokumen pembayaran gaji tenaga penunjang)	12	13	0.00	0.00	0.00	0	13.00	1.083333333
		Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan			12.00	12.00	100.00	12	24.00	0
6.01.01.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	90	186.63	90.00	122.17	135.74	90	398.80	4.431111111
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Dinas Jabatan yang difasilitasi jasa pemeliharaannya	1	1	0.00	0.00	#DIV/0!	0	1.00	1
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			0.00	0.00	0.00	0	0.00	0
6.01.01.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			50.00	60.00	120.00	50	110.00	0

**Renja Inspektorat
Kabupaten Trenggalek Tahun 2025**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang difasilitasi jasa pemeliharaannya	20	45	0.00	0.00	0.00	0	45.00	2.25
6.01.01.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30	20	0.00	0.00	0.00	0	20.00	0.666666667
		Jumlah mebel yang dipelihara			30.00	14.00	46.67	30	44.00	0
6.01.01.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	58	25	0.00	0.00	0.00	0	25.00	0.431034483
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara			55.00	64.00	116.36	55	119.00	0
6.01.01.01.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0	0	0.00	0.00	0.00	1	1.00	0
6.01.01.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi			1.00	3.00	300.00	1	4.00	0
		Jumlah Rehabilitasi Gudung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Diadakan	1	2	0.00	0.00	0.00	0	2.00	2
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	20	46	0.00	0.00	0.00	0	46.00	2.3
6.01.01.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi			2.00	3.00	150.00	3	6.00	0
		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara (Unit)	8	4	0.00	0.00	0.00	0	4.00	0.5
6.01.01.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase menurunnya jumlah temuan hasil pengawasan	96	89.17	96.00	67.34	70.15	93	249.51	2.5990625
6.01.01.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah laporan Penyelenggaraan pengawasan internal yang disusun	365	438	453.00	388.00	85.65	453	1279.00	3.504109589

**Renja Inspektorat
Kabupaten Trenggalek Tahun 2025**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6.01.01.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			108.00	142.00	131.48	108	250.00	0
		Jumlah laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah yang disusun	102	107	0.00	0.00	0.00	0	107.00	1.049019608
6.01.01.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah			125.00	79.00	63.20	125	204.00	0
		Jumlah laporan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun	128	51	0.00	0.00	0.00	0	51.00	0.3984375
6.01.01.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja			84.00	35.00	41.67	84	119.00	0
		Jumlah laporan reviu laporan kinerja yang disusun	84	84	0.00	0.00	0.00	0	84.00	1
6.01.01.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan			80.00	111.00	138.75	80	191.00	0
		Jumlah laporan reviu laporan keuangan yang disusun	198	158	0.00	0.00	0.00	0	158.00	0.797979798
6.01.01.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa			50.00	17.00	34.00	50	67.00	0
		Jumlah laporan Pengawasan Desa yang disusun	36	35	0.00	0.00	0.00	0	35.00	0.972222222
6.01.01.01.02.2.01.06	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk			2.00	2.00	100.00	2	4.00	0
		Jumlah Laporan Kerjasama Pengawasan Internal Yang disusun	2	2	0.00	0.00	0.00	0	2.00	1
6.01.01.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			4.00	5.00	125.00	4	9.00	0
		Jumlah Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan	8	8	0.00	0.00	0.00	0	8.00	1
		Jumlah temuan yang ditindaklanjuti	227	161	0.00	0.00	0.00	0	161.00	0.709251101

**Renja Inspektorat
Kabupaten Trenggalek Tahun 2025**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6.01.01.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang dilaksanakan	100	58.33	100.00	49.02	49.02	100	207.35	2.0735
6.01.01.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani			3.00	1.00	33.33	3	4.00	0
		Jumlah kasus Penanganan Kerugian Negara/Daerah yang diselesaikan	2	2	0.00	0.00	0.00	0	2.00	1
6.01.01.01.02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu			17.00	11.00	64.71	17	28.00	0
		Jumlah laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	12	2	0.00	0.00	0.00	0	2.00	0.166666667
6.01.01.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase rumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang ditetapkan	100	107.237	100.00	107.89	107.89	100	315.13	3.15127
		Jumlah dokumen hasil pendampingan dan asistensi yang disusun	76	85	76.00	88.00	115.79	76	249.00	3.276315789
6.01.01.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang disusun	7	7	7.00	7.00	100.00	7	21.00	3
6.01.01.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun			2.00	2.00	100.00	2	4.00	0
		Jumlah Kebijakan Teknis Di Bidang Fasilitasi Pengawasan Yang Dirumuskan	5	5	0.00	0.00	0.00	0	5.00	1
6.01.01.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun			5.00	5.00	100.00	5	10.00	0
		Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang dirumuskan	2	2	0.00	0.00	0.00	0	2.00	1

**Renja Inspektorat
Kabupaten Trenggalek Tahun 2025**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6.01.01.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah pendampingan dan asistensi yang dilakukan	76	87	76.00	88.00	115.79	76	251.00	3.302631579
6.01.01.01.03.2.02.01	<i>Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah</i>			41.00	41.00	100.00	41	82.00	0
6.01.01.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan pendampingan asistensi verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi</i>			41.00	0.00	0.00	41	41.00	0
		Jumlah Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan (kali)	30	3	0.00	0.00	0.00	0	3.00	0.1
6.01.01.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	<i>Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi</i>			2.00	2.00	100.00	2	4.00	0
		Jumlah obyek yang memperoleh sosialisasi saber pungli	2	2	0.00	0.00	0.00	0	2.00	1
		Jumlah PD yang melaporkan pengendalian gratifikasi tepat waktu	40	41	0.00	0.00	0.00	0	41.00	1.025
6.01.01.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas</i>			41.00	46.00	112.20	41	87.00	0
		Jumlah Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas yang dilaksanakan (kali)	4	82.97	0.00	0.00	0.00	0	82.97	20.7425

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka kemudian diterbitkan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Inspektorat menerangkan bahwa tugas Inspektorat kabupaten Trenggalek adalah membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Sedangkan pada Peraturan Bupati tersebut pada pasal 7 ayat (2) menerangkan bahwa Inspektorat mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan serta pendampingan dan asistensi;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. Penyusunan Laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, kinerja pelayanan yang diberikan Inspektorat, yaitu :

Program Penyelenggaraan Pengawasan berupa :

- i. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;
 2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah;
 3. Reviu Laporan Kinerja;
 4. Reviu Laporan Keuangan;
 5. Pengawasan Desa;
 6. Kerjasama Pengawasan Internal; dan

7. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.
- ii. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.
 1. Penanganan Penyelesaian kerugian Negara/Daerah; dan
 2. Pengawasan Dengan Tujuan tertentu.

Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi

- i. Perumusan Kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
 1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan; dan
 2. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan.
- ii. Pendampingan dan Asistensi
 1. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah;
 2. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi;
 3. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; dan
 4. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi penegakan Integritas.

Adapun kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten disajikan dalam Tabel 2.3 (T-C.30) sebagai berikut :

**Renja Inspektorat
Kabupaten Trenggalek Tahun 2025**

No	Indikator Sasaran	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Nilai (Kategori) Nilai SAKIP			88,50 (A)	89 (A)	90,50 (AA)	91 (AA)	90,38(AA)	90,58 (AA)	masih proses	91 (AA)	
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat			81,5	82	82,5	83	83,63	99,55	98,38	99	
3.	Level maturitas SPIP			level 3	level 3	level 4	level 4	level 3	level 3 (skor 3,100)	masih proses	level 4	
4.	Level Kapabilitas APIP			level 2	level 3	level 3	level 3	level 2	level 2 (2,60)	masih proses	level 3	
5.	Persentase rekomendasi pengawasan eksternal yang ditindak lanjuti			91,5	92	92,5	93	92,41	92,01	93,29	93	
6.	Persentase rekomendasi pengawasan internal yang ditindak lanjuti			75	80	83	85	98,21	98,35	98,21	100	
7.	Persentase Perangkat Daerah dalam menerapkan SPIP			50	60	75	90	67	67,5	75	90	
8.	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh hasil evaluasi SAKIP minimal kategori A/AA			65	75	88	100	100	100	88	100	
9.	Nilai MCP dari KPK			40,50	41	41,5	42	91,8	88	masih proses	92	
10.	Persentase capaian delapan area perubahan yang tuntas melaksanakan rencana aksi pencegahan korupsi			68	70	72	74	100	100	100	74	

**Renja Inspektorat
Kabupaten Trenggalek Tahun 2025**

No	Indikator Sasaran	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11.	Persentase Perangkat Daerah yang diusulkan menuju WBK/WBBM			20	20	20	20	22	12,50	12,50	20	

2.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PD

Terkait dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi dari Inspektorat, maka beberapa isu-isu penting mengenai pengawasan yang akan dilaksanakan oleh inspektorat, antara lain ;

a) Kegiatan pengawasan yang akan dilakukan oleh Inspektorat pada Tahun 2025 tertuang dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan yang antara lain meliputi :

1. Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki resiko tinggi dan daya ungkit untuk meningkatkan perekonomian daerah seperti urusan pariwisata dan urusan pangan.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk :

- a) Pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat
 - b) Pemeriksaan Kinerja
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah meliputi :
 - 2.1. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah
 - a) Rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah
 - b) Rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah
 - c) Rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara
 - d) Rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah
 - 2.2. Pemeriksaan Pengelolaan keuangan Daerah
 - a) Akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah
 - b) Akuntabilitas pengelolaan belanja daerah
 - c) Pengelolaan pembiayaan daerah
 - d) Pengelolaan manajemen kas dan persediaan
 - e) Pengelolaan barang milik daerah

- 2.3. Reviu laporan Keuangan
 - a) Laporan keuangan
- 2.4. Kegiatan Pengawasan Lainnya
 - a) *Probitiy Audit*
 - b) Laporan Kinerja (reviu)
 - c) Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (reviu)
 - d) Perhitungan kerugian keuangan daerah (Pemeriksaan dengan tujuan tertentu)
 - e) Perencanaan dan penganggaran yang berbasis *Gender responsive gender* (evaluasi)
 - f) Pengelolaan keuangan Desa (pemeriksaan)
- 3. Penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan Integritas meliputi :
 - a) Pengendalian Gratifikasi
 - b) Pelaksanaan survei penilaian Integritas
 - c) Penilaian mandiri pelaksana reformasi birokrasi
 - d) Asistensi pembangunan reformasi birokrasi
 - e) Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi
 - f) Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi
 - g) Operasional sapu bersih pungutan liar
 - h) Pemeriksaan Investigasi
 - i) Tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/ pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi
 - j) Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas intern pemerintah
- 4. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah meliputi :
 - a) Kapabilitas APIP level 3
 - b) Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah
 - c) Manajemen Resiko

- d) Pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus duapuluh) jam per tahun

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan hasil dari proses pelaksanaan perencanaan yang di amanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam proses perencanaan awal program kegiatan dan sub kegiatan RKPD dengan program kegiatan dan sub kegiatan yang telah disetujui di dalam pelaksanaan APBD Tahun 2025, memang beberapa usulan yang diajukan di dalam rancangan awal RKPD tidak sama dengan alokasi rencana yang telah ditetapkan. Hal itu disebabkan karena adanya beberapa perubahan-perubahan mengenai peraturan-peraturan perundang-undangan, kebijakan dan arahan baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dalam mewujudkan target dan sasaran pembangunan nasional terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun program,kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Trenggalek tahun 2025 adalah guna mendukung target dan sasaran pembangunan khususnya pembangunan di daerah. Reviuw terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Inspektorat Kabupaten Trenggalek disajikan dalam table 2.4 (T-C.31) sebagai berikut :

**Renja Inspektorat
Kabupaten Trenggalek Tahun 2025**

No.	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP.000)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase nilai aset dalam kondisi baik Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 % 100 % 100 %	7,308,739,900	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase nilai aset dalam kondisi baik Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 % 100 % 100 %	8,635,503,150	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	26 dokumen	82,477,263	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	65 dokumen	189,502,000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	39,502,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17 Dokumen	39,502,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	42,975,263	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	48 Laporan	150,000,000	

**Renja Inspektorat
Kabupaten Trenggalek Tahun 2025**

No.	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP.000)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	5,605,427,637	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	5,990,319,250	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	55 Orang/bulan	5,540,982,637	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	54Orang/bulan	5,909,719,250	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	59,445,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	32 Dokumen	75,600,000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	350 Dokumen	2,500,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	371 Dokumen	2,500,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	35 Laporan	2,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	38 Laporan	2,500,000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Barang Milik Daerah yang diselesaikan	90 %	7,500,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Barang Milik Daerah yang diselesaikan	90 %	7,500,000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan,	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	7,500,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan,	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	27 Laporan	7,500,000	

**Renja Inspektorat
Kabupaten Trenggalek Tahun 2025**

No.	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP.000)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Semua Kelurahan/Desa					Semua Kelurahan/Desa				
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	440,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	720,000,000	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	30,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	60,000,000	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	11 Dokumen	10,000,000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	50 Dokumen	10,000,000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	55 Orang	400,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	54 Orang	650,000,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	360,169,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	640,000,000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	2,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	10,000,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 paket	26,040,600	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 paket	75,000,000	

**Renja Inspektorat
Kabupaten Trenggalek Tahun 2025**

No.	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP.000)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	5 Paket	47,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4 Paket	75,000,000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	8 Paket	43,696,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	8 Paket	75,000,000	
	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah paket bahan/ Material yang disediakan	9 Paket	41,617,400	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah paket bahan/ Material yang disediakan	10 Paket	75,000,000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	8 Laporan	122,315,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	6 Laporan	150,000,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	8 Laporan	72,500,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	8 Laporan	175,000,000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	12 Dokumen	5,000,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	12 Dokumen	5,000,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan	100 %	398,831,667	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan	100 %	653,000,000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan,	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	30,000,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan,	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	430,000,000	

**Renja Inspektorat
Kabupaten Trenggalek Tahun 2025**

No.	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP.000)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Semua Kelurahan/Desa					Semua Kelurahan/Desa				
	Pengadaan Mebel	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah paket mebel yang disediakan	23 Unit	52,331,667	Pengadaan Mebel	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah paket mebel yang disediakan	7 Unit	15,000,000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	54 unit	292,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	7 unit	142,500,000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 unit	25,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	65,500,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan	100 %	129,675,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan	100 %	134,175,000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 Laporan	6,500,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 Laporan	6,500,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	49,425,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	63,675,000	

**Renja Inspektorat
Kabupaten Trenggalek Tahun 2025**

No.	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP.000)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 Laporan	5,000,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 Laporan	5,500,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan	68,750,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan	58,500,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	95 %	284,159,333	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	90 %	301,006,900	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 unit	126,500,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 unit	145,283,338	
	Pemeliharaan Mebel	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah mebel yang dipelihara	42 unit	9,500,000	Pemeliharaan Mebel	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah mebel yang dipelihara	30 unit	9,500,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	68 unit	19,300,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	55 unit	19,300,000	
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 unit	33,833,333	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 unit	33,833,333	

**Renja Inspektorat
Kabupaten Trenggalek Tahun 2025**

No.	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP.000)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	39,526,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	39,526,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	55,500,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	53,564,229	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		Persentase menurunnya jumlah temuan hasil pengawasan	92 %	2,900,000,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		Persentase menurunnya jumlah temuan hasil pengawasan	93 %	1,161,000,000	
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Jumlah laporan Penyelenggaraan pengawasan internal yang disusun	462 laporan	2,560,400,000	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Jumlah laporan Penyelenggaraan pengawasan internal yang disusun	453 laporan	1,065,000,000	
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah laporan hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	119 Laporan	348,815,000	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah laporan hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	108 Laporan	250,000,000	
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah laporan hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	128 Laporan	500,000,000	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah laporan hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	125 Laporan	190,000,000	
	Reviu Laporan Kinerja	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	84 Laporan	443,650,000	Reviu Laporan Kinerja	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	84 Laporan	110,000,000	
	Reviu Laporan Keuangan	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan,	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	75 Laporan	450,000,000	Reviu Laporan Keuangan	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan,	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	80 Laporan	245,000,000	

**Renja Inspektorat
Kabupaten Trenggalek Tahun 2025**

No.	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP.000)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Semua Kelurahan/Desa					Semua Kelurahan/Desa				
	Pengawasan Desa	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	50 Laporan	387,500,000	Pengawasan Desa	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	50 Laporan	125,000,000	
	Kerja Sama Pengawasan Internal	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk	2 Kesepakatan	235,435,000	Kerja Sama Pengawasan Internal	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk	2 Kesepakatan	20,000,000	
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen	200,000,000	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen	125,000,000	
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Persentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang dilaksanakan	100 %	339,600,000	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Persentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang dilaksanakan	100 %	96,000,000	
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani	5 Laporan	20,000,000	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani	3 Laporan	11,000,000	
	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	20 Laporan	319,600,000	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	17 Laporan	85,000,000	
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Persentase rumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi	100 %	2,350,000,000	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Persentase rumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi	100 %	879,469,300	

**Renja Inspektorat
Kabupaten Trenggalek Tahun 2025**

No.	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP.000)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			pengawasan yang ditetapkan					pengawasan yang ditetapkan			
			Jumlah dokumen hasil pendampingan dan asistensi yang disusun.	76 dokumen				Jumlah dokumen hasil pendampingan dan asistensi yang disusun.	76 dokumen		
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang disusun	7 dokumen	330,000,000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang disusun	7 dokumen	100,000,000	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2 rekomendasi	150,000,000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2 rekomendasi	50,000,000	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di Bidang fasilitasi pengawasan yang disusun	5 rekomendasi	180,000,000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di Bidang fasilitasi pengawasan yang disusun	5 rekomendasi	50,000,000	
	Pendampingan dan Asistensi		Jumlah pendampingan dan asistensi yang dilakukan	76 kali	2,020,000,000	Pendampingan dan Asistensi		Jumlah pendampingan dan asistensi yang dilakukan	76 kali	779,469,300	
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	40 Perangkat Daerah	21,000,000	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	41 Perangkat Daerah	50,000,000	
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan,	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi,	40 Perangkat Daerah	696,387,500	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan,	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi,	41 Perangkat Daerah	86,856,800	Terbitnya surat dari kemenpanRB No: B/01/RB.06/2023 tentang perubahan

**Renja Inspektorat
Kabupaten Trenggalek Tahun 2025**

No.	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP.000)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Semua Kelurahan/Desa	Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				Semua Kelurahan/Desa	Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi			evaluasi RB Tahun 2023
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2 Kegiatan	810,000,000	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2 Kegiatan	450,000,000	
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas	40 Perangkat Daerah	492,612,500	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas	41 Perangkat Daerah	192,612,500	
Total					12,558,739,900						10,675,972,450

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dari rancangan awal yang telah disusun pada Inspektorat Kabupaten Trenggalek telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja Inspektorat. Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Trenggalek yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam dokumen rencana kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Trenggalek. Disamping itu, dokumen rencana kerja memuat informasi tentang program, kegiatan, sub kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Inspektorat Kabupaten Trenggalek.

Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan Inspektorat Kabupaten Trenggalek. Program kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Trenggalek tahun 2025 telah sesuai dengan Permendagri nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur program kegiatan dan sub kegiatan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuthakiran

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan; dan
3. Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi.

Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh SKPD, Inspektorat Kabupaten Trenggalek mempunyai beberapa kegiatan yang dilakukan dalam menunjang program yang telah ditetapkan, yaitu:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN / KOTA
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

- 3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
- 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 - 1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.
 - 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 5) Penyediaan Bahan/Material
 - 6) Fasilitas Kunjungan Tamu
 - 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 8) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan Mebel
 - 2) Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
 - 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pemeliharaan Mebel
 - 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 4) Pemeliharaan aset tak berwujud
 - 5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 6) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
 1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal

- 1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
 - 2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
 - 3) Reviu Laporan Kinerja
 - 4) Reviu Laporan Keuangan
 - 5) Pengawasan Desa
 - 6) Kerja Sama Pengawasan Internal
 - 7) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.
- 1) Penanganan Penyelesaian kerugian Negara/Daerah
 - 2) Pengawasan Dengan Tujuan tertentu
3. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
1. Perumusan Kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
 - 1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
 - 2) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
 2. Pendampingan dan Asistensi
 - 1) Pendampingan dan Asistensi urusan Pemerintahan Daerah.
 - 2) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi
 - 3) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
 - 4) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi penegakan Integritas

Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Inspektorat Tahun 2025 disajikan dalam Tabel 2.5 (T-C.32) sebagai berikut :

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rincian Sub Kegiatan (Paket Pekerjaan dan / Lokasi)	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	BESARAN/VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100%	
			Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	
			Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	
	Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	26 dokumen	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Laporan	
		Penyusunan Renja 2026, Perubahan Renja 2025		2 Dokumen	
		Penyusunan PK Tahun 2024, Perubahan PK Tahun 2024		2 Dokumen	
		Penyusunan RKA 2026, Perubahan RKA 2025		2 Dokumen	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rincian Sub Kegiatan (Paket Pekerjaan dan / Lokasi)	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	BESARAN/VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
		Penyusunan DPA 2026, Perubahan DPA 2025		2 Dokumen	
		Penyusunan Rencana Aksi 2025 dan Perubahan Rencana Aksi 2025		2 dokumen	
		Penyusunan Manajemen Resiko		1 dokumen	
		Penyusunan PKPT		1 dokumen	
		Penyusunan Dialog Kinerja		1 dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
		Bukti dukung LPPD		1 laporan	
		LKJiP		1 laporan	
		Bukti dukung LKPJ		1 laporan	
		IKM		1 laporan	
		Laporan Evaluasi Dialog Kinerja		1 laporan	
		MCP		1 laporan	
		Penyusunan Lapdu		1 laporan	
		Evaluasi Renja Tribulanan		1 laporan	
		Evaluasi/Pemantauan renaksi		1 laporan	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rincian Sub Kegiatan (Paket Pekerjaan dan / Lokasi)	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	BESARAN/VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
		Lap Capaian Output		1 laporan	
		LKE SAKIP		1 laporan	
		Kapabilitas apip		1 laporan	
		LKE ZI		1 laporan	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Inspektorat / Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	55 orang/bulan	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	
		Lap Gaji Bulanan, THR dan Gaji 13		4 Dokumen	
		Laporan TPP Bulanan dan TPP 30 %		4 dokumen	
		Laporan Honorarium Pengelola Keuangan dan Barang		4 Dokumen	
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	350 Dokumen	
		SPJ		106 Dokumen	
		SPP		121 Dokumen	
		SPM		121 Dokumen	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rincian Sub Kegiatan (Paket Pekerjaan dan / Lokasi)	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	BESARAN/VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
		Jurnal Penyesuaian Belanja		1 Dokumen	
		Tindak Lanjut Pemeriksaan Inspektorat/BPK		1 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	35 Laporan	
		Laporan Keuangan		1 Dokumen	
		SPJ Fungsional		12 dokumen	
		Rekon LRA		4 dokumen	
		Prognosis		1 Dokumen	
		DTH + Rekon		13 dokumen	
		Penyusunan Laporan BA Pemeriksaan KAS pertriwulan		4 dokumen	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Barang Milik Daerah yang diselesaikan	90 %	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
		KIB TW		1 Laporan	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rincian Sub Kegiatan (Paket Pekerjaan dan / Lokasi)	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	BESARAN/VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
		Mutasi Barang TW		4 Laporan	
		Laporan Stock Opname TW		4 Laporan	
		Laporan Hasil Pengawasan/ Pengendalian BMD		1 Laporan	
		Surat Keterangan Pemakaian BMD		1 Laporan	
		RKBMD		1 Laporan	
		Penyusunan Laporan Pemenuhan Tindak Lanjut pemeriksaan APIP/BPK		1 Laporan	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
		Penjagaan KP		1 dokumen	
		Penjagaan KGB		1 Dokumen	
		Bazeting		2 Dokumen	
		Penjagaan Pensiun		1 Dokumen	
		ASIK		1 dokumen	
		SKP Bulanan dan SKP Tahunan		2 Dokumen	
		Usulan Mutasi ASN		1 Dokumen	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rincian Sub Kegiatan (Paket Pekerjaan dan / Lokasi)	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	BESARAN/VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
		Analisis Jabatan (Anjab)		1 Dokumen	
		Kompetensi ASN		1 Dokumen	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN Inspektorat (diklat pembentukan, diklat penjenjangan, dilkat teknis pengawasan) / Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	55 orang	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor dalam 1 Tahun	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 paket	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket Pengadaan Peralatan dan perlengkapan Kantor dalam 1 Tahun	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 paket	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paket Pengadaan Bahan Logistik Kantor yang disediakan dalam 1 Tahun	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	5 paket	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Paket Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan dalam 1 Tahun	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	8 paket	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rincian Sub Kegiatan (Paket Pekerjaan dan / Lokasi)	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	BESARAN/VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
	Penyediaan Bahan/Material	Paket Pengadaan Bahan/Material dalam 1 Tahun	Jumlah paket bahan/ Material yang disediakan	9 paket	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan Kunjungan Tamu dalam 1 Tahun	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	8 laporan	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam 1 Tahun	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	8 laporan	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan penatausahaan arsip dinamis dalam 1 Tahun	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	12 dokumen	
	Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan	100 %	
	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel dalam 1 Tahun	Jumlah paket mebel yang disediakan	7 unit	
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya dalam 1 Tahun	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	17 unit	
	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan	100 %	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan Surat Menyurat dalam 1 Tahun	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 laporan	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rincian Sub Kegiatan (Paket Pekerjaan dan / Lokasi)	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	BESARAN/VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	
		Lap pembayaran Listrik		12 Laporan	
		Lap pembayaran telp		12 Laporan	
		lap pembayaran PAM		12 Laporan	
		Lap pembayaran Internet		12 Laporan	
		Lap pembayaran Koran		12 Laporan	
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Laporan Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam 1 Tahun	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 laporan	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Honorarium Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dalam 1 Tahun	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan	
	Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	90 %	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6 unit kendaraan operasional roda empat 44 unit kendaraan operasional roda dua	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 unit	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rincian Sub Kegiatan (Paket Pekerjaan dan / Lokasi)	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	BESARAN/VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara dalam 1 Tahun	Jumlah mebel yang dipelihara	30 unit	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara dalam 1 Tahun	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	55 unit	
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara dalam 1 tahun	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 unit	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi dalam 1 tahun	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi dalam 1 tahun	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		Persentase menurunnya jumlah temuan hasil pengawasan	93 %	
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Jumlah laporan Penyelenggaraan pengawasan internal yang disusun	382 Laporan	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rincian Sub Kegiatan (Paket Pekerjaan dan / Lokasi)	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	BESARAN/VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah dalam 1 Tahun	Jumlah laporan hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	119 Laporan	
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah dalam 1 Tahun	Jumlah laporan hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	128 Laporan	
	Reviu Laporan Kinerja	Laporan Reviu Laporan Kinerja dlm 1 Tahun	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	84 Laporan	
	Reviu Laporan Keuangan	Laporan Reviu Laporan Keuangan dalam 1 Tahun	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	75 Laporan	
	Pengawasan Desa	Laporan Pengawasan Desa dalam 1 Tahun	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	50 Laporan	
	Kerjasama Pengawasan Internal	Kesepakatan Kerjasama Pengawasan Internal dalam 1 Tahun	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk	2 Kesepakatan	
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dalam 1 Tahun	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen	
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu		Persentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang dilaksanakan	100 %	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rincian Sub Kegiatan (Paket Pekerjaan dan / Lokasi)	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	BESARAN/VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah dalam 1 Tahun	Jumlah laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani	5 laporan	
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dalam 1 Tahun	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	20 laporan	
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN , PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Persentase rumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang ditetapkan	100 %	
			Jumlah dokumen hasil pendampingan dan asistensi yang disusun.	76 dokumen	
	Perumusan Kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi pengawasan		Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang disusun	7 dokumen	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Rekomendasi Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dalam 1 Tahun	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2 rekomendasi	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rincian Sub Kegiatan (Paket Pekerjaan dan / Lokasi)	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	BESARAN/VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Rekomendasi Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan dalam 1 Tahun	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di Bidang fasilitasi pengawasan yang disusun	5 rekomendasi	
	Pendampingan dan Asistensi		Jumlah pendampingan dan asistensi yang dilakukan	76 kali	
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Pendampingan Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	40 Perangkat Daerah	
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	PMPRB	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	40 Perangkat Daerah	
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dalam 1 Tahun	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2 kegiatan	
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	laporan pengendalian Gratifikasi, Kepatuhan LHKPN dan PZI	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi	40 Perangkat Daerah	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rincian Sub Kegiatan (Paket Pekerjaan dan / Lokasi)	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	BESARAN/VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
			dan verifikasi penegakan integritas		

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Sesuai dengan visi pembangunan nasional dalam mendukung pelaksanaan Visi Indonesia Emas 2025 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 “**Negara Nusantara Berdaulat, Maju, Berkelanjutan**”. Lima sasaran utama visi Indonesia 2045 adalah:

1. Pendapatan per kapita setara negara maju;
2. Kemiskinan menuju nol persen dan ketimpangan berkurang;
3. Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat;
4. Daya saing sumber daya manusia meningkat; dan
5. Intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju *net zero emission*.

Guna mewujudkan visi Indonesia 2045 diwujudkan ke dalam 8 Misi Pembangunan yaitu:

1. Transformasi Sosial;
2. Transformasi Ekonomi;
3. Transformasi Tata Kelola;
4. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia;
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;
6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan;
7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; dan
8. Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan.

RPJMN 2025-2045 merupakan upaya untuk mendukung pelaksanaan Visi Indonesia Emas 2045. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 258. Arah kebijakan pembangunan tahun 2025 yang merupakan sinkronisasi dan harmonisasi arah pembangunan nasional dan provinsi adalah untuk mendukung dan mewujudkan pembangunan daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, peningkatan dan pemerataan kesempatan kerja, peningkatan dan pemerataan lapangan berusaha, peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas pelayanan publik, serta peningkatan dan pemerataan daya saing daerah.

Tema pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah provinsi Jawa Timur pada Tahun 2025 mengambil tema **“Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Mendukung Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan”**. Hal ini selaras dengan tema Rencana Kerja Pembangunan Nasional Tahun 2025 yaitu **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**. Isu strategis pada RKPD 2025 Provinsi Jawa Timur adalah:

1. Percepatan pemulihan ekonomi daerah melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah sumber daya lokal;
2. Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berkelanjutan;
3. Pemenuhan kebutuhan layanan dasar bidang Pendidikan, Kesehatan, perumahan, sanitasi dan social dasar khusus peningkatan lapangan kerja, penanganan stunting, dan penanggulangan kemiskinan;
4. Kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya local;
5. Pemerataan kemandirian pangan dan pemanfaatan potensi energi baru terbarukan;
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kapasitas bencana; dan
7. Tatakelola pemerintahan yang belum optimal.

Dengan menelaah kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Timur sebagaimana dijabarkan diatas, maka pemerintah kabupaten Trenggalek harus mendukung tercapainya sasaran dan bidang-bidang pembangunan nasional tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian sasaran dan bidang-bidang pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi

kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi.

Guna penyelarasan tema pembangunan nasional dan pembangunan provinsi Jawa Timur, Kabupaten Trenggalek Menyusun langkah strategis arah pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 yang berfokus pada **“Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Agroindustri yang Ramah lingkungan dan Berkelanjutan serta Penguatan Daya Saing Daerah dan Pelayanan Publik”**. Untuk itu, supaya lebih terarah dalam pencapaian sasaran pembangunan daerah tahun 2025 maka tema pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 adalah **“Kedaulatan Pangan, Peningkatan Pendapatan Masyarakat dan Pengelolaan Pertanian Berkelanjutan dalam Rangka Adaptasi Perubahan Iklim Ditopang dengan Birokrasi yang Melayani”**. Prioritas pembangunan Kabupaten Trenggalek pada RKPD Tahun 2025 adalah:

1. Pertumbuhan ekonomi melalui kedaulatan pangan, peningkatan pendapatan masyarakat;
2. Infrastruktur berwawasan lingkungan dalam rangka adaptasi perubahan iklim; dan
3. Peningkatan tata kelola birokrasi yang melayani.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PD

3.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan tempat singgah atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan tujuan yang telah ditetapkan Inspektorat Kabupaten Trenggalek memahami apa yang harus dilaksanakan antara kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan dana yang dimiliki, faktor lingkungan yang mempengaruhi dan faktor-faktor penentu keberhasilan lainnya.

Adapun tujuan Inspektorat Kabupaten Trenggalek berdasarkan misi ketiga RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 adalah :

1. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih, efektif, efisien, produktif dan profesional;

2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan; dan
3. Meningkatkan Indeks Persepsi Anti Korupsi.

3.2.1 Sasaran

Sasaran merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategi organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan. Fokus utama penentu sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diharapkan.

Adapun sasaran Inspektorat Kabupaten Trenggalek dalam upaya mewujudkan tujuan:

1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien;
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan; dan
3. Meningkatnya upaya pencegahan korupsi instansi pemerintah.

Adapun linieritas antara Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan tujuan dan sasaran Perangkat daerah dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran pada RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran PD

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis Big Data	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, kompeten, profesional, kreatif dan kolaboratif demi pembangunan yang efektif dan efisien dan menunjang pelayanan publik yang prima	Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih, efektif, efisien, produktif dan profesional	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (kategori nilai) SAKIP
				Indeks Kepuasan Masyarakat
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Level kapabilitas APIP
				Persentase rekomendasi pengawasan

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama
				eksternal yang ditindaklanjuti
				Persentase rekomendasi pengawasan internal yang ditindaklanjuti
				Persentase Perangkat Daerah dalam menerapkan SPIP
				Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh hasil evaluasi SAKIP minimal kategori A/AA
		Meningkatkan Indeks Persepsi Anti Korupsi	Meningkatnya upaya pencegahan Korupsi Instansi Pemerintah	Persentase capaian delapan area perubahan yang tuntas melaksanakan rencana aksi pencegahan korupsi
				Persentase Perangkat Daerah yang diusulkan menuju WBK/WBBM

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Inspektorat Kabupaten Trenggalek dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan mempunyai beberapa program sebagaimana termuat dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Trenggalek diantaranya:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota

Tolak ukur dari program ini adalah Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi; Persentase nilai aset dalam kondisi baik, serta Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Tolak ukur dari program ini adalah Persentase menurunnya jumlah temuan hasil pengawasan

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Tolak ukur dari program ini adalah Persentase rumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang diusulkan dan Jumlah dokumen hasil pendampingan dan asistensi yang disusun.

Jumlah Program	: 3 program
Jumlah Kegiatan	: 12 kegiatan
Jumlah Sub Kegiatan	: 44 sub kegiatan

**BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Trenggalek. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran dan tujuan dalam rangka mendukung pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

Adapun yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja *input*, *process*, *outputs*, *outcomes* maupun *impacts* sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan pada Rencana Kerja Tahunan (Renja) Inspektorat Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 tercantum dalam Tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16
						INSPEKTORAT			11.616.836.086,00				12.473.739.900,00
	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			11.616.836.086,00				12.473.739.900,00
	6	01				INSPEKTORAT DAERAH			11.616.836.086,00				12.473.739.900,00
1	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi; Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100;100;100 %;%;%	9.411.454.512,00			-	7.223.739.900,00
	6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	26 dokumen	189.502.000,00			-	82.477.263,00
	6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	39.502.000,00	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		39.502.000,00
	6	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	150.000.000,00	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		42.975.263,00
	6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	6.924.777.286,00			-	5.605.427.637,00
	6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	6.877.777.286,00	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5.540.982.637,00
	6	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	42.000.000,00	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		59.445.000,00

**Renja Inspektorat
Kabupaten Trenggalek Tahun 2025**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16
	6	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	350 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2.500.000,00
	6	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	35 Laporan	2.500.000,00	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2.500.000,00
	6	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah yang diselesaikan	90 %	7.500.000,00			-	7.500.000,00
	6	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	7.500.000,00	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7.500.000,00
	6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	1.170.000.000,00			-	410.000.000,00
	6	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	11 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10.000.000,00
	6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	55 Orang	1.160.000.000,00	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		400.000.000,00
	6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	577.500.000,00			-	360.169.000,00
	6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	5.000.000,00	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2.000.000,00
	6	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	37.500.000,00	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		26.040.600,00

**Renja Inspektorat
Kabupaten Trenggalek Tahun 2025**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16
	6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	45.000.000,00	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		47.000.000,00
	6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	75.000.000,00	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		43.696.000,00
	6	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material							
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	9 Paket	85.000.000,00	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		41.617.400,00
	6	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	8 Laporan	175.000.000,00	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		122.315.000,00
	6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan	150.000.000,00	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		72.500.000,00
	6	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5.000.000,00
	6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan	100 %	209.222.488,00			-	344.331.667,00
	6	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel							
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	50.000.000,00	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		52.331.667,00
	6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17 Unit	159.222.488,00	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		292.000.000,00
	6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan	100 %	106.369.400,00			-	129.675.000,00

**Renja Inspektorat
Kabupaten Trenggalek Tahun 2025**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16
	6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	6.500.000,00	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6.500.000,00
	6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	63.675.000,00	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		49.425.000,00
	6	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	9.000.000,00	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5.000.000,00
	6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	27.194.400,00	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		68.750.000,00
	6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	90 %	226.583.338,00			-	284.159.333,00
	6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	145.283.338,00	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		126.500.000,00
	6	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel							
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit	5.000.000,00	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9.500.000,00
	6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit	39.300.000,00	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		19.300.000,00
	6	01	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud							
							Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	35.000.000,00	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		33.833.333,00
	6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							

**Renja Inspektorat
Kabupaten Trenggalek Tahun 2025**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.000.000,00	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		39.526.000,00
	6	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1.000.000,00	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		55.500.000,00
2	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase menurunnya jumlah temuan hasil pengawasan	92 %	1.311.000.000,00			-	2.900.000.000,00
	6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah laporan Penyelenggaraan pengawasan internal yang disusun	382 laporan	1.065.000.000,00			-	2.560.400.000,00
	6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	119 Laporan	250.000.000,00	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		343.815.000,00
	6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	128 Laporan	190.000.000,00	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		500.000.000,00
	6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	84 Laporan	110.000.000,00	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		443.650.000,00
	6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	75 Laporan	245.000.000,00	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		450.000.000,00
	6	01	02	2.01	0005	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	50 Laporan	125.000.000,00	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		387.500.000,00
	6	01	02	2.01	0006	Kerja Sama Pengawasan Internal							

**Renja Inspektorat
Kabupaten Trenggalek Tahun 2025**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16
							Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	2 Kesepakatan	20.000.000,00	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		235.435.000,00
	6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP							
							Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen	125.000.000,00	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		200.000.000,00
	6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang dilaksanakan	100 %	246.000.000,00			-	339.600.000,00
	6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah							
							Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	5 Laporan	11.000.000,00	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		20.000.000,00
	6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu							
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	20 Laporan	235.000.000,00	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		319.600.000,00
3	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase rumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang ditetapkan Jumlah dokumen hasil pendampingan dan asistensi yang disusun	100 % 76 dokumen	894.381.574,00			-	2.350.000.000,00
	6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang disusun	7 dokumen	100.000.000,00			-	330.000.000,00
	6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan							
							Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi	14.000.000,00	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		150.000.000,00
	6	01	03	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan							
							Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	5 Rekomendasi	86.000.000,00	Kab. Trenggalek, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA		180.000.000,00

Renja Inspektorat
Kabupaten Trenggalek Tahun 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16
										Kecamatan, Semua Kel/Desa	ALOKASI UMUM		
	6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah pendampingan dan asistensi yang dilakukan	76 Kali	794.381.574,00			-	2.020.000.000,00
	6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah							
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	40 perangkat daerah	32.459.988,00	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		21.000.000,00
	6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi							
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	40 perangkat daerah	29.000.000,00	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		696.387.500,00
	6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi							
							Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2 Kegiatan	666.200.892,00	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		810.000.000,00
	6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas							
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	40 perangkat daerah	66.720.694,00	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		492.612.500,00
	J U M L A H								11.616.836.086,00				12.473.739.900,00

**BAB V
PENUTUP**

Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 merupakan rencana program kerja pengawasan yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kabupaten Trenggalek tahun 2025 merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat, dan dalam melaksanakan tugas-tugas pembinaan dan pengawasan tersebut sangat ditentukan oleh kualitas SDM yang mempunyai berbagai disiplin ilmu, keahlian serta mentalitas yang baik dan bertanggungjawab (profesional), serta sarana/prasarana yang mendukung kelancaran tugas-tugas pengawasan. Selain itu pula diharapkan obyek yang diperiksa secara cepat dan tepat waktu dapat memenuhi kewajibannya memberikan tanggapan atas hasil temuan pemeriksaan (berupa tindak lanjut yang dilengkapi dengan bukti-bukti otentik yang diperlukan), sehingga Inspektorat secara keseluruhan dapat mencapai target dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun 2025.

BUPATI TRENGGALEK,

MOCHAMAD NUR ARIFIN